

URGENSI STUDI TENTANG *PROCUREMENT CONTRACT*

Oleh :

Y. Sogar Simamora

ABSTRACT

Contractualization is kind of government activity in acquiring goods, services and infrastructure as well. Procurement contract has several important function especially in enhancing economic development in a state. In Indonesia, this kind of contract also has function in empowering micro economic scale. Since the aim of procurement study is to provide equal protection between public fund interest in one hand and privat sector in the other hand, general principle of contract law must be taken into consideration together with transparency as the most important principle in government contract.

Key words : *contractualization, government contract, procurement contract, freedom of contract, good faith and transparency.*

PENDAHULUAN

Praktik pembuatan kontrak oleh pemerintah merupakan fenomena yang universal. Ini dilakukan dalam rangka pemenuhan keutuhan dalam penyelenggaraan negara. Jenis kebutuhan ini beragam, dapat berupa barang, jasa ataupun infrastruktur. Seperti orang atau badan privat, pemerintah pun memerlukan kebutuhan dalam menjalankan fungsinya. Kontrak merupakan salah satu instrumen guna pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena pemenuhan kebutuhan ini bersifat rutin maka praktik pembuatan kontrak oleh pemerintah pun menjadi kegiatan rutin (*routin practice*). Jenis kontrak yang merupakan bagian dari *government contract* ini mempunyai

karakteristik yang khas karena kedudukan pemerintah sebagai kontraktan membawa beberapa implikasi hukum. Dalam berbagai kepustakaan *government contract* pada umumnya dipahami sebagai kontrak yang didalamnya pemerintah terlihat sebagai pihak dengan objek pengadaan barang. *Government contract* dengan demikian diberi makna sama dengan *procurement contract* (Colin Turpin; 1972 : 15). Tetapi kalau dicermati lebih lanjut, isi kontrak dalam *government contract* tidak selalu bersifat pengadaan. Dalam kontrak pengadaan, pemerintah pada dasarnya dalam kepastian sebagai pemberi (*the State as buyer*). Namun dalam situasi lain pemerintah juga dapat bertindak dalam kepastian sebagai penjual